

Pengaruh Kompetensi, Spi, Integritas, Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Pendidikan Sebagai Moderasi

Navisa Maulidya¹, Aminul Fajri², Fahmi Firmansyah³

^{1,2,3}Program studi akuntansi, Universitas Pancasakti Tegal

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 15 Juni 2025

Revised: 29 Juli 2025

Accepted: 31 Juli 2025

Keywords:

Akuntabilitas, Integritas,
Kompetensi, Sistem
Pengendalian Internal
Tingkat Pendidikan

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, integritas, dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, serta menguji peran tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 107 aparatur desa di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA).

Originalitas/Novelty: Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi teori agensi, *fraud triangle* dan *human capital theory* untuk pencegahan kecurangan di tingkat desa, dengan memasukkan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi.

Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan bahwa kompetensi, integritas, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Sistem pengendalian internal tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Tingkat pendidikan memperkuat pengaruh integritas dan akuntabilitas, namun melemahkan hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan.

Implikasi: Penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan kapasitas dan integritas aparatur desa melalui pendidikan, serta reformasi sistem pengendalian internal yang berbasis substansi, sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih dan akuntabel.

Research Objective: This study aims to analyze the effect of competence, internal control system, integrity, and accountability on fraud prevention in village financial management, and test the role of education level as a moderating variable.

Research Methods: The study used a quantitative approach with a survey method of 107 village officials in Adiwerna District, Tegal Regency. Data analysis was conducted using multiple linear regression and moderated regression analysis (MRA).

Originality/Novelty: The novelty of this research lies in the integration of agency theory, fraud triangle and human capital theory for fraud prevention at the village level, by including the level of education as a moderating variable.

Research Results: The results show that competence, integrity, and accountability have a significant effect on fraud prevention. The internal control system does not show a significant effect. The level of education strengthens the effect of integrity and accountability, but weakens the relationship between the internal control system and fraud prevention.

Implication: This study implies that strengthening the capacity and integrity of village officials through education, as well as substance-based internal control system reforms, are needed to create clean and accountable village financial governance.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Corresponding Author:

Navisa Maulidya

Program studi akuntansi, Universitas Pancasakti Tegal

Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

navisamaulidya36@gmail.com

Pendahuluan

engelolaan keuangan desa merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Bustang, Akhmad, & Hakim, 2008). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan yang luas untuk mengelola potensi dan sumber dayanya, termasuk keuangan, guna mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan (Nabilah & Fikriana, 2023). Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama menyangkut integritas dan akuntabilitas aparatur desa. Kelemahan dalam sistem pengendalian internal, rendahnya kompetensi teknis dan etika, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor dominan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa (Rahmawati et al., 2023).

Temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan peningkatan signifikan kasus penyalahgunaan dana desa dari tahun 2020 hingga 2023, yang melibatkan aparatur desa di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tegal (Toni, 2024). Salah satu kasus yang mencolok adalah dugaan penyalahgunaan dana sebesar Rp390 juta oleh mantan Kepala Desa Lebakgowah untuk kepentingan pribadi (RadarTegal.com, 2024). Fenomena ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak hanya terkait aspek teknis administratif, tetapi juga menyangkut dimensi moral dan kelembagaan. Dalam literatur tata kelola publik kontemporer, terdapat penekanan penting pada sinergi antara kompetensi SDM, sistem kontrol internal, serta nilai-nilai etika dan integritas dalam mencegah kecurangan (*fraud*) (Safitri, 2022; Waruwu, 2023; Adyaksana et al., 2024).

Berbagai studi terkini telah mengkonfirmasi bahwa peningkatan kompetensi aparatur, akuntabilitas, dan kesesuaian kompensasi memiliki korelasi positif dengan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa (Utami, Kristiantari, & Miati, 2023). Selain itu, keberadaan sistem pengendalian internal yang efektif dan budaya integritas yang tinggi terbukti mampu menciptakan tata kelola desa yang lebih bersih dan efisien (Mustofa & Nur Afifah, 2023). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait peran tingkat pendidikan aparatur desa dalam mendorong tata kelola keuangan yang antikorupsi. Padahal, pendidikan berpotensi memperkuat kesadaran etika, kemampuan regulatif, serta kecakapan teknis dalam implementasi kebijakan desa (Setiadi & Devi, 2020).

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab celah literatur tersebut dengan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas, dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, serta mengkaji peran tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur pengelolaan keuangan sektor publik berbasis desa, serta menjadi landasan praktis dalam menyusun kebijakan peningkatan kapasitas dan integritas aparatur desa secara berkelanjutan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pada inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas di level pemerintahan terkecil.

Pengembangan Hipotesis

Kompetensi Aparatur Desa dan Pencegahan Kecurangan

Teori *Resource-Based View* (Barney, 1991) menyatakan bahwa sumber daya internal organisasi, termasuk sumber daya manusia, merupakan kunci keunggulan kompetitif dan efektivitas organisasi. Dalam sektor pemerintahan desa, kompetensi aparatur mencakup pemahaman terhadap regulasi, keterampilan teknis, serta kemampuan dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Aparatur yang kompeten memiliki kapasitas untuk mengenali dan menghindari praktik menyimpang. Penelitian oleh (Rahmawati, dkk., 2023) membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dan pencegahan kecurangan.

Hipotesis 1 (H1): Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan

Kompetensi individu saja tidak cukup untuk mencegah kecurangan jika tidak didukung oleh sistem pengawasan yang terstruktur. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat memperkecil peluang terjadinya penyimpangan karena seluruh aktivitas keuangan dikendalikan secara sistematis. (Mustofa & Nur Afifah, 2023) menemukan bahwa implementasi sistem pengendalian internal di desa memiliki pengaruh signifikan dalam menekan potensi *fraud*.

Hipotesis 2 (H2): Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Integritas dan Pencegahan Kecurangan

Selain faktor teknis dan struktural, nilai moral individu juga memainkan peran penting. Berdasarkan *Fraud Triangle Theory* (Schuchter & Levi, 2016), integritas yang tinggi akan menekan kecenderungan seseorang untuk merasionalisasi tindakan menyimpang. Aparatur desa yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan etika publik akan lebih enggan terlibat dalam tindakan curang meskipun terdapat tekanan atau kesempatan. Penelitian oleh (Waruwu, 2023) menyatakan bahwa integritas personal merupakan salah satu faktor kunci dalam menekan perilaku koruptif di lingkungan desa.

Hipotesis 3 (H3): Integritas aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas dan Pencegahan Kecurangan

Nilai integritas perlu diperkuat melalui sistem pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Teori *Agensi* (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban dalam hubungan principal-agent. Akuntabilitas menjamin bahwa pihak yang diberi kewenangan (*agent*) bertanggung jawab atas hasil keputusannya kepada pihak yang memberi mandat (*principal*). Akuntabilitas yang tinggi mempersempit ruang untuk penyimpangan karena seluruh kegiatan keuangan dapat ditelusuri dan dikontrol. Studi oleh (T. A. Jayanti & Setiyani, 2022) menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan desa.

Hipotesis 4 (H4): Akuntabilitas aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderasi

Keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh kompetensi, integritas, sistem, dan akuntabilitas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan. *Human Capital Theory* (Becker, 2010) menyatakan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi dalam pengembangan kualitas individu, baik dari segi kognitif, etika, maupun keterampilan teknis. Aparatur dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih memahami regulasi, memiliki kemampuan analisis yang lebih baik, serta memiliki kesadaran etis yang lebih kuat. Penelitian (Setiadi & Devi, 2020) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas manajerial dan akuntabilitas individu. Oleh karena itu, tingkat pendidikan diasumsikan memperkuat pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, integritas, dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan.

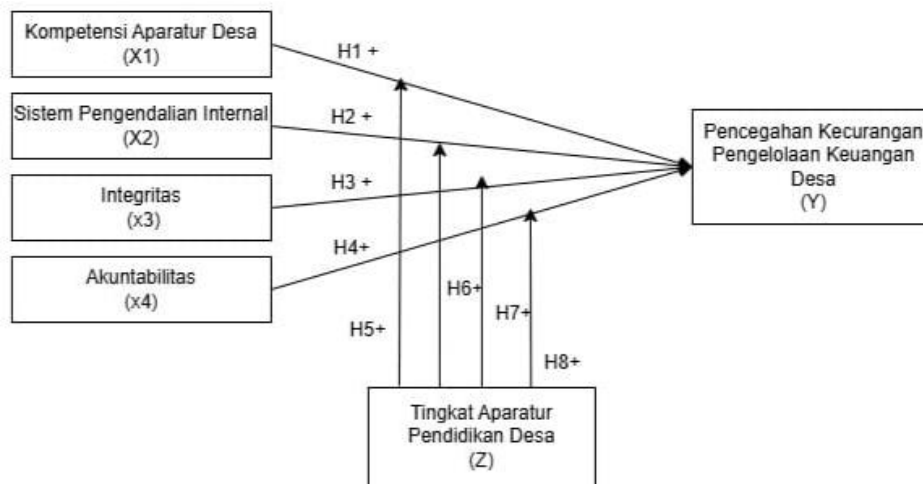
Hipotesis 5 (H5): Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh kompetensi terhadap pencegahan kecurangan.

Hipotesis 6 (H6): Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.

Hipotesis 7 (H7): Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh integritas terhadap pencegahan kecurangan.

Hipotesis 8 (H8): Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan penjabaran teori dan hipotesis di atas, diberikan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel pada penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Pada Penelitian Ini

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas, dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan upaya pencegahan kecurangan.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, yang terdiri dari 21 desa. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *stratified random sampling* agar diperoleh representasi yang proporsional dari seluruh desa. Jumlah responden ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 5%, sehingga diperoleh 107 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang disusun berdasarkan indikator teoritis dari setiap variabel penelitian. Instrumen pengukuran menggunakan skala Likert lima poin untuk menilai tingkat kesetujuan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang merepresentasikan konstruk masing-masing variabel. Uji validitas instrumen dilakukan melalui analisis korelasi Pearson Product Moment, sedangkan uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha guna memastikan konsistensi internal antar item.

Data yang dikumpulkan dianalisis melalui serangkaian prosedur statistik. Tahap awal melibatkan analisis statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik untuk memastikan kelayakan model regresi, termasuk uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda diterapkan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari variabel-variabel bebas terhadap pencegahan kecurangan. Untuk menguji pengaruh moderasi dari tingkat pendidikan, digunakan teknik *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan menambahkan interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi ke dalam model regresi.

Model pertama yang digunakan untuk menguji pengaruh langsung dari masing-masing variabel independen terhadap pencegahan kecurangan dirumuskan sebagai $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$, di mana Y merepresentasikan pencegahan kecurangan, X_1 hingga X_4 secara berurutan mencerminkan kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, integritas, dan akuntabilitas. Koefisien β_1 sampai β_4 menggambarkan besar pengaruh masing-masing variabel, sedangkan β_0 adalah konstanta dan e merupakan error term.

Model kedua yang digunakan untuk menguji efek moderasi dirumuskan sebagai $Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5Z + \beta_6(X_1Z) + \beta_7(X_2Z) + \beta_8(X_3Z) + \beta_9(X_4Z) + e$, dengan Z sebagai variabel tingkat pendidikan aparatur desa, dan X_1Z hingga X_4Z adalah variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk melihat signifikansi pengaruh kolektif variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji t untuk menilai signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara individu. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa

besar variasi dalam pencegahan kecurangan yang dapat dijelaskan oleh model. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar kontribusi model dalam menjelaskan fenomena yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan seluruh aparatur desa di Kecamatan Adiwerna yang tersebar di 21 desa, dengan total 107 responden. Seluruh kuesioner dikembalikan (*response rate* 100%). Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (65,42%) dan berada pada rentang usia di atas 40 tahun (42,06%).

Uji Deskriptif

Statistik deskriptif untuk setiap variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Uji Deskriptif

| Variabel | N | Min | Max | Mean | Std.Deviasi |
|------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------------|
| Kompetensi | 107 | 14.00 | 32.00 | 23.38 | 4.13 |
| Sistem Pengendalian Internal | 107 | 30.00 | 70.00 | 50.43 | 8.85 |
| Integritas | 107 | 12.00 | 29.00 | 20.53 | 3.52 |
| Akuntabilitas | 107 | 10.00 | 22.00 | 16.14 | 3.08 |
| Pencegahan Kecurangan | 107 | 12.00 | 27.00 | 19.88 | 3.56 |
| Tingkat Pendidikan | 107 | 2.00 | 4.00 | 3.21 | 0.64 |

Dari hasil uji deskriptif di atas, dapat diketahui bahwa variabel Kompetensi memiliki nilai rata-rata sebesar 23,38 dengan standar deviasi 4,13, yang menunjukkan variasi sedang pada tingkat kompetensi responden. Sistem Pengendalian Internal menunjukkan variasi yang lebih besar dengan standar deviasi 8,85. Variabel Integritas, Akuntabilitas dan Pencegahan Kecurangan memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi yang menunjukkan persepsi yang beragam di antara responden. Tingkat Pendidikan mayoritas responden cukup homogen dengan rata-rata 3,21 (skala 2-4) dan standar deviasi 0,64.

Uji Validitas dan Realibilitas

Berikut ini adalah hasil uji validitas dan realibilita untuk beberapa indikator pada variabel Kompetensi (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2):

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

| Variabel | Indikator | r Hitung | r Tabel | Validitas |
|--|-----------|----------|---------|-----------|
| Kompetensi (X1) | X1.1 | 0,604 | 0,176 | Valid |
| | X1.2 | 0,670 | 0,176 | Valid |
| | X1.3 | 0,504 | 0,176 | Valid |
| Sistem Pengendalian Internal (X2) | X2.1 | 0,703 | 0,176 | Valid |
| | X2.2 | 0,482 | 0,176 | Valid |
| | X2.3 | 0,621 | 0,176 | Valid |

Tabel 3 Hasil Uji Realibilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Standar | Keterangan |
|-----------------------------------|------------------|---------|------------|
| Kompetensi (X1) | 0,848 | 0,70 | Reliabel |
| Sistem Pengendalian Internal (X2) | 0,934 | 0,70 | Reliabel |

| Variabel | Cronbach's Alpha | Standar | Keterangan |
|------------------------|------------------|---------|------------|
| Integritas (X3) | 0,827 | 0,70 | Reliabel |
| Akuntabilitas (X4) | 0,806 | 0,70 | Reliabel |
| Pencegahan Fraud (Y) | 0,820 | 0,70 | Reliabel |
| Tingkat Pendidikan (Z) | 0,802 | 0,70 | Reliabel |

Seluruh indikator pada tiap variabel memiliki nilai korelasi > 0,176 (r tabel, n = 107, α = 5%), yang berarti valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel > 0,70, sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Residual yang berdistribusi normal penting untuk memastikan validitas uji statistik inferensial, terutama dalam model regresi linear klasik (Sudariana & Yoedani, 2022). Pengujian ini menggunakan metode non-parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Berdasarkan hasil uji yang disajikan dalam Tabel 4 diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,181, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal.

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

| Variabel | Unstandardized Residual |
|---------------------------------------|-------------------------|
| N | 19 |
| Normal Parameters^{ab} | |
| Mean | 0.0000000 |
| Std. Deviation | 0.60318915 |
| Most Extreme Differences | |
| Absolute | 0.166 |
| Positive | 0.166 |
| Negative | -0.099 |
| Test Statistic | 0.166 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.181 |

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas residual, yang berarti model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi linear yang tinggi antar variabel bebas dalam model regresi. Kehadiran multikolinearitas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil, sehingga penafsiran hasil analisis menjadi kurang akurat (Yaldi et al., 2022). Identifikasi multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Adapun kriteria yang digunakan yaitu: multikolinearitas dianggap terjadi apabila nilai tolerance berada di bawah 0,10 atau nilai VIF melebihi 10. Ringkasan hasil pengujian disajikan dalam Tabel 5.

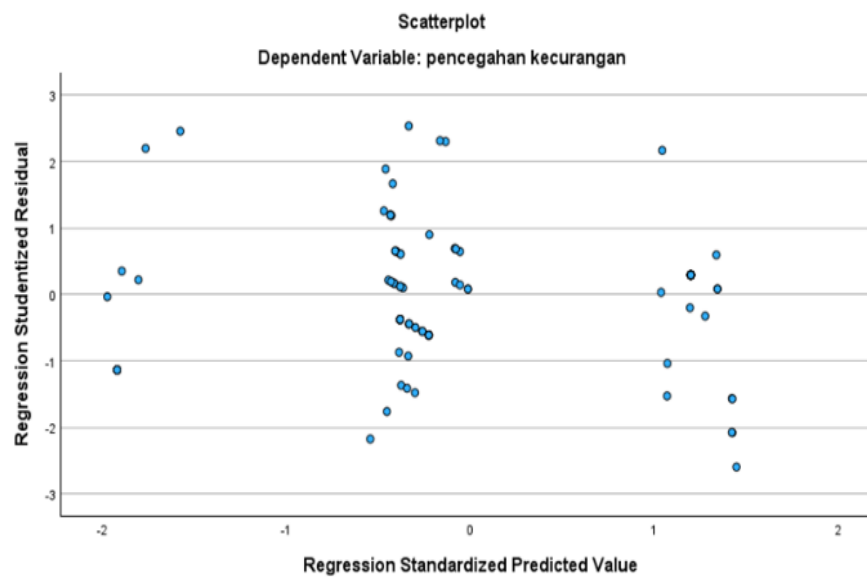
Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Tolerance | VIF |
|-----------------------|-----------|-------|
| Kompetensi Sistem | 0.617 | 1.620 |
| Pengendalian Internal | 0.844 | 1.185 |
| Integritas | 0.573 | 1.745 |
| Akuntabilitas | 0.827 | 1.209 |
| Tingkat Pendidikan | 0.813 | 1.231 |

Berdasarkan hasil pada tabel, seluruh variabel bebas menunjukkan nilai *tolerance* lebih dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10. Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas di antara variabel-variabel independen dalam model. Dengan demikian, seluruh variabel layak dimasukkan ke dalam model regresi tanpa menimbulkan bias atau gangguan terhadap keakuratan hasil analisis.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengujian dilakukan menggunakan grafik *scatterplot* dengan memetakan nilai residual terhadap nilai prediksi, seperti pada Gambar 2. Apabila titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas.



Gambar 2 Grafik Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 2, dapat dilihat bahwa titik-titik residual menyebar di atas dan di bawah garis horizontal nol secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan sudah memenuhi syarat dalam hal kestabilan varians error.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen, yaitu kompetensi, sistem pengendalian internal, integritas, dan akuntabilitas, secara simultan dan parsial memengaruhi variabel dependen, yaitu pencegahan kecurangan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil analisis regresi disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Variabel | B | Std.Error | Beta | t | Sig. |
|------------------------------|--------|-----------|-------|--------|-------|
| (Constant) | 36.671 | 1.005 | - | 36.478 | <.001 |
| Kompetensi | 29.592 | 1.903 | 1.631 | 15.549 | <.001 |
| Sistem Pengendalian Internal | 0.003 | 0.010 | 0.005 | 0.264 | 0.042 |
| Integritas | 12.013 | 1.946 | 0.654 | 6.173 | <.001 |
| Akuntabilitas | 0.017 | 0.008 | 0.037 | 2.109 | 0.037 |

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 36,671 + 29,592(X_1) + 0,003(X_2) + 12,013(X_3) + 0,017(X_4)$$

Hasil regresi menunjukkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Variabel kompetensi memiliki pengaruh paling dominan ($B = 29,592$; $t = 15,549$; $p < 0,001$), menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi aparatur secara signifikan meningkatkan kemampuan mencegah *fraud*. Integritas juga berpengaruh signifikan ($B = 12,013$; $t = 6,173$; $p < 0,001$), mendukung pendapat (Adyaksana et al., 2024) bahwa integritas individu berperan penting dalam menekan niat melakukan penyimpangan. Sementara itu, akuntabilitas menunjukkan pengaruh yang signifikan namun lebih kecil ($B = 0,017$; $t = 2,109$; $p = 0,037$), tetap menjadi faktor penting dalam memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban publik. Sistem pengendalian internal, meskipun koefisiennya sangat kecil ($B = 0,003$), tetap menunjukkan signifikansi statistik ($t = 0,264$; $p = 0,042$), mengindikasikan bahwa keberadaannya memberikan kontribusi dalam mengurangi risiko fraud. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa pencegahan kecurangan tidak hanya bergantung pada aspek individual, tetapi juga pada sistem dan tata kelola organisasi yang baik.

Uji Kelayakan Model (Uji F - ANOVA)

Uji F digunakan untuk menghitung akurasi model regresi secara simultan. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

| Sumber | Sum Of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|-----------------|------------|-------------|----------|----------|
| Regression | 1306.259 | 4 | 326.565 | 850.565 | 0.000 |
| Residual | 39.162 | 102 | 0.384 | - | - |
| Total | 1345.421 | 106 | - | - | - |

Hasil analisis membuktikan model regresi cukup baik dalam memprediksi variabel dependen (pencegahan fraud), dengan nilai signifikansi $p < 0.001$.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menghitung pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t ditampilkan pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Uji Parsial

| Variabel | B | Std.Error | Beta | t | Sig. |
|---------------|--------|-----------|-------|--------|-------|
| (Konstanta) | 36.671 | 1.005 | — | 36.478 | 0.000 |
| Kompetensi | 29.592 | 1.903 | 1.631 | 15.549 | 0.000 |
| Sistem | | | | | |
| Pengendalian | 0.003 | 0.010 | 0.005 | 0.264 | 0.042 |
| Internal | | | | | |
| Integritas | 12.013 | 1.946 | 0.654 | 6.173 | 0.000 |
| Akuntabilitas | 0.017 | 0.008 | 0.037 | 2.109 | 0.037 |

Hasil analisis regresi parsial menunjukkan bahwa kompetensi merupakan prediktor dominan dalam mencegah kecurangan, dengan pengaruh yang sangat kuat dan signifikan secara statistik ($\beta = 1.631$; $p < 0.001$). Temuan ini mengindikasikan bahwa individu dengan tingkat kompetensi yang tinggi cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengidentifikasi, memahami, dan mencegah praktik kecurangan. Selain itu, integritas juga berkontribusi signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan ($\beta = 0.654$; $p < 0.001$), menegaskan bahwa nilai moral dan etika profesional memainkan peran penting dalam membentuk perilaku yang antikorupsi. Meskipun akuntabilitas menunjukkan pengaruh signifikan ($p = 0.037$), kekuatan kontribusinya relatif kecil dalam model. Sementara itu, sistem pengendalian internal, meskipun signifikan secara statistik ($p = 0.042$), memiliki koefisien regresi yang sangat rendah ($B = 0.003$), sehingga efektivitasnya dalam studi ini cenderung lemah dan mungkin hanya berperan sebagai kontrol formal yang tidak cukup kuat tanpa dukungan faktor individu.

Koefisien Determinasi

Model regresi yang diterapkan dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,985, yang mengindikasikan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas (kompetensi, integritas, akuntabilitas, dan sistem pengendalian internal) dengan variabel terikat (pencegahan kecurangan). Selain itu, nilai R Square sebesar 0,971 menunjukkan bahwa 97,1% variasi pada pencegahan kecurangan dapat dijelaskan secara simultan oleh keempat variabel bebas tersebut. Selain itu, nilai $Adjusted R$ Square sebesar 0,970 menunjukkan bahwa model ini tetap stabil dan tidak mengalami *overfitting* meskipun mempertimbangkan jumlah variabel prediktor yang digunakan. Adapun nilai $Standard Error of Estimate$ sebesar 0,61963 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif rendah, menandakan bahwa model ini memiliki akurasi yang tinggi dalam memperkirakan tingkat pencegahan kecurangan. Temuan ini menegaskan bahwa model yang dibangun memiliki kekuatan prediktif yang sangat baik dan layak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis terkait upaya pencegahan kecurangan.

Analisis Moderasi dengan Variabel Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan memoderasi hubungan antara variabel independen dengan pencegahan kecurangan, dilakukan analisis regresi moderasi menggunakan metode *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasilnya disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9 Hasil Moderated Regression Analysis

| Variabel Interaksi | B | Std.Error | Beta | t | Sig. |
|------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|
| (Konstanta) | 7.4588 | 3.542 | — | 2.130 | 0.036 |
| Kompetensi | 22.542 | 1.648 | 1.242 | 13.675 | 0.000 |
| Sistem Pengendalian Internal | -0.209 | 0.046 | 0.395 | 4.531 | 0.167 |
| Integritas | 14.698 | 1.671 | 0.801 | 8.798 | 0.000 |
| Akuntabilitas | 0.103 | 0.028 | 0.224 | 3.686 | 0.000 |
| Tingkat Pendidikan | 9.243 | 1.265 | 1.662 | 7.308 | 0.000 |
| Kompetensi × Pendidikan | 0.003 | 0.037 | 0.002 | 0.091 | 0.028 |
| SPI × Pendidikan | -0.061 | 0.014 | -0.362 | 4.278 | 0.000 |
| Integritas × Pendidikan | 3.155 | 0.411 | 2.096 | 7.676 | 0.000 |
| Akuntabilitas × Pendidikan | 0.023 | 0.008 | 0.171 | 2.812 | 0.006 |

Hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berperan signifikan dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara beberapa variabel independen dengan pencegahan kecurangan. Interaksi antara integritas dan pendidikan menunjukkan signifikansi yang sangat tinggi ($p < 0.001$), mengindikasikan bahwa pengaruh integritas terhadap fraud akan semakin kuat seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan seseorang. Hal serupa juga ditemukan pada interaksi antara akuntabilitas dan pendidikan ($p = 0.006$), yang menandakan bahwa pendidikan berperan penting dalam memperkuat internalisasi nilai tanggung jawab individu dalam mencegah tindakan kecurangan.

Namun demikian, hasil yang cukup menarik muncul pada interaksi antara sistem pengendalian internal (SPI) dan pendidikan. Koefisien interaksi yang bernilai negatif ($B = -0.061$) menunjukkan bahwa efektivitas SPI justru cenderung menurun pada individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh kemungkinan bahwa individu yang lebih berpendidikan memiliki kemampuan analitis yang lebih baik untuk menemukan celah atau kelemahan dalam sistem yang ada. Sementara itu, interaksi antara kompetensi dan pendidikan hanya menunjukkan signifikansi marginal ($p = 0.028$) dengan nilai koefisien yang sangat kecil, sehingga pengaruh moderasi pendidikan terhadap kompetensi untuk

pencegahan kecurangan dapat dikatakan lemah. Temuan-temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek pendidikan dalam desain kebijakan anti-kecurangan, khususnya dalam bidang penguatan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Kompetensi dalam hal pemahaman prosedur pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, serta pemenuhan regulasi menjadi instrumen penting dalam membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang antikorupsi. Kompetensi tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup pemahaman konteks sosial, budaya birokrasi, serta keterampilan analitis dan etis. Temuan ini konsisten dengan teori *Resource-Based View* (Barney, 1991), yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan keunggulan kompetitif dalam organisasi sektor publik.

Studi oleh Jayanti & Suardana (2019) juga mendukung hasil ini, menyatakan bahwa kompetensi yang memadai memungkinkan aparatur untuk menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara akuntabel dan minim risiko kecurangan. Temuan serupa juga diperkuat dalam kajian oleh Ghani et al. (2020, *International Journal of Public Sector Management*), yang menemukan bahwa kapasitas teknis berkontribusi signifikan dalam mitigasi fraud di sektor pemerintah lokal. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan fondasi utama yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi strategis dalam mendorong efisiensi dan integritas keuangan desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan

Temuan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan, mengindikasikan lemahnya penerapan kontrol internal di tingkat desa. Secara teoretis, hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dirancang dengan baik tidak akan efektif tanpa pemahaman mendalam, komitmen, dan kepemilikan oleh pelaksana kebijakan di level akar rumput. Seperti dikemukakan oleh COSO Framework (2017), efektivitas pengendalian internal sangat ditentukan oleh lingkungan pengendalian (*control environment*) dan budaya organisasi yang mendukung fungsi pengawasan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Hashim & Mahadi (2021, *Asian Journal of Accounting and Governance*), yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di pemerintahan desa cenderung bersifat formalitas administratif tanpa fungsi evaluatif substantif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembenahan struktural: mulai dari pelatihan ulang aparatur desa dalam memahami lima komponen pengendalian internal menurut COSO (*control environment, risk assessment, control activities, information & communication, dan monitoring*), hingga integrasi teknologi berbasis akuntabilitas publik seperti pelaporan digital real-time dan dashboard pengawasan yang dapat diakses publik.

Pengaruh Integritas terhadap Pencegahan Kecurangan

Integritas memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam menekan praktik kecurangan. Dalam konteks kelembagaan yang lemah atau minim pengawasan, integritas bertindak sebagai *self-regulatory mechanism* yang berasal dari nilai-nilai moral aparatur desa. Penelitian ini selaras dengan kerangka *Fraud Triangle Theory* (Cressey, 1953), di mana integritas berfungsi menekan rasionalisasi terhadap tindakan curang. Studi oleh Yuniningsih (2017) dan didukung oleh Surbakti et al. (2021, *Journal of Governance and Integrity*) menunjukkan bahwa aparatur dengan integritas tinggi cenderung menunjukkan perilaku administratif yang patuh terhadap regulasi meskipun dalam kondisi tekanan eksternal.

Integritas bukan hanya hasil dari moral individu, tetapi juga produk dari sistem rekrutmen yang berbasis merit, kepemimpinan etis, dan budaya organisasi yang berlandaskan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas aparatur desa perlu didukung oleh pembinaan karakter secara sistematis, penguatan reward and punishment system, serta transparansi informasi publik agar kontrol sosial dapat berfungsi secara optimal.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Kecurangan

Meskipun pengaruhnya tidak sekuat kompetensi atau integritas, akuntabilitas tetap berperan signifikan dalam membatasi ruang gerak terjadinya fraud. Melalui mekanisme pertanggungjawaban publik yang terbuka, akuntabilitas menjadi *deterrent mechanism* terhadap potensi penyimpangan. Hal ini diperkuat oleh *Agency Theory* (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan bahwa pemisahan antara prinsipal (masyarakat) dan agen (aparatur desa) membutuhkan sistem pertanggungjawaban untuk mencegah konflik kepentingan.

Studi oleh Jumame et al. (2020) dan Reza et al. (2022, *Journal of Public Administration Research and Theory*) menguatkan argumen bahwa akuntabilitas publik berbasis partisipasi komunitas mempersempit ruang gelap (*information asymmetry*) yang biasanya digunakan sebagai celah kecurangan. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak cukup hanya hadir dalam bentuk laporan keuangan tahunan, tetapi harus disertai mekanisme umpan balik masyarakat, audit partisipatif, dan keterbukaan data anggaran desa melalui platform digital.

Moderasi Tingkat Pendidikan terhadap Hubungan Kompetensi dan Pencegahan Kecurangan

Temuan menunjukkan bahwa pendidikan memoderasi secara positif pengaruh kompetensi terhadap pencegahan fraud. Aparatur yang berpendidikan tinggi cenderung lebih mampu memahami sistem keuangan desa secara menyeluruh dan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini sejalan dengan *Human Capital Theory* (Becker, 1993) yang menegaskan bahwa pendidikan meningkatkan kemampuan adaptasi, analisis risiko, dan etika administratif.

Penelitian serupa oleh Setiadi & Devi (2020) dan Hanif et al. (2022, *International Journal of Rural Development*) menunjukkan bahwa aparatur desa dengan latar belakang pendidikan tinggi lebih cepat mengadopsi reformasi sistem pelaporan dan mampu menginternalisasi pentingnya integritas publik. Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar simbol status, tetapi merupakan prasyarat dalam menciptakan kompetensi yang adaptif dan progresif.

Moderasi Negatif Pendidikan terhadap Hubungan Sistem Pengendalian Internal dan Pencegahan Kecurangan

Menariknya, tingkat pendidikan memoderasi secara negatif hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan fraud. Ini menunjukkan bahwa aparatur yang lebih berpendidikan cenderung lebih kritis terhadap sistem yang bersifat simbolik dan tidak fungsional. Temuan ini memperkuat tesis bahwa sistem pengendalian internal yang lemah tidak dapat dikompensasi oleh kecakapan individu saja. Studi oleh Nurhayati & Aisyah (2021, *Journal of Local Government Studies*) menegaskan bahwa *smart officials without smart systems* tidak mampu mengatasi kompleksitas pengelolaan anggaran publik.

Oleh karena itu, reformasi pada sistem itu sendiri menjadi mutlak. Desain ulang sistem kontrol berbasis risiko, pelibatan masyarakat, serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi merupakan langkah kunci agar efektivitas sistem pengendalian internal dapat dirasakan nyata.

Moderasi Pendidikan terhadap Pengaruh Integritas dan Pencegahan Kecurangan

Tingkat pendidikan memperkuat efek integritas dalam menekan fraud. Pendidikan membentuk kemampuan reflektif, kesadaran etik, dan tanggung jawab profesional. Hal ini diperkuat oleh studi Zhang et al. (2022, *Public Integrity Journal*), yang menyatakan bahwa etika publik lebih mudah tertanam pada aktor birokrasi yang memiliki latar pendidikan tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mendorong program pendidikan vokasional dan karakter bagi calon serta aparatur desa aktif guna menciptakan tata kelola keuangan yang antikorupsi secara kultural dan struktural.

Moderasi Pendidikan terhadap Pengaruh Akuntabilitas dan Pencegahan Kecurangan

Pendidikan juga memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap pencegahan fraud. Aparatur yang berpendidikan tinggi lebih memahami konsekuensi hukum dan sosial dari laporan yang tidak benar. Mereka juga cenderung menjadikan akuntabilitas sebagai bagian dari nilai profesional, bukan sekadar beban administratif. Penelitian oleh Fitriani et al. (2021, *Governance Studies Journal*) menunjukkan bahwa desa dengan aparatur berpendidikan tinggi memiliki sistem pelaporan yang lebih transparan dan partisipatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang penting terhadap pengembangan teori dan praktik tata kelola keuangan publik di tingkat desa, khususnya dalam upaya pencegahan kecurangan (fraud). Dengan menguji pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, integritas, dan akuntabilitas terhadap pencegahan kecurangan, serta mengevaluasi peran tingkat pendidikan sebagai

variabel moderasi, penelitian ini mengisi kekosongan literatur yang selama ini belum banyak membahas interaksi antar variabel tersebut dalam konteks pemerintahan desa.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkaya pendekatan integratif dalam tata kelola sektor publik dengan menggabungkan perspektif *Agency Theory*, *Human Capital Theory*, dan *Fraud Triangle Theory*. Kompetensi dan integritas aparatur desa terbukti memiliki pengaruh paling kuat dalam menekan kecurangan, mempertegas bahwa kapabilitas teknis dan moral merupakan dua fondasi utama dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Temuan ini juga menggarisbawahi bahwa sistem pengendalian internal belum efektif secara substantif, meskipun keberadaannya diatur secara normatif, mengindikasikan perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan kualitas implementasi.

Menariknya, tingkat pendidikan aparatur desa menunjukkan efek moderasi yang kompleks: memperkuat pengaruh integritas dan akuntabilitas, namun justru memperlemah pengaruh sistem pengendalian internal. Hal ini menandakan bahwa pendidikan menciptakan kesadaran kritis terhadap ketidakefektifan sistem kontrol yang hanya bersifat administratif. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya memperbaiki kapasitas teknis aparatur, tetapi juga membentuk sensitivitas terhadap kelemahan struktural dalam sistem tata kelola keuangan desa.

Secara praktis, penelitian ini menyarankan perlunya program pelatihan yang menyeluruh bagi aparatur desa yang tidak hanya fokus pada aspek teknis pengelolaan keuangan, tetapi juga pada pembentukan integritas dan akuntabilitas melalui pendidikan etika publik. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal agar sistem tersebut tidak berhenti pada prosedur formal, melainkan mampu berfungsi sebagai mekanisme pencegah fraud yang adaptif terhadap dinamika lokal.

Sebagai arah penelitian lanjutan, disarankan penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk menggali lebih dalam faktor sosiologis, kultural, dan politik yang memengaruhi perilaku fraud di tingkat desa. Di samping itu, eksplorasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem pelaporan digital, audit partisipatif berbasis aplikasi, atau integrasi *machine learning* untuk mendeteksi pola anomali dalam pengelolaan keuangan desa dapat menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola desa yang cerdas dan antikorupsi.

Referensi

- Adyaksana, R. I., Lusmino Basia, & Putri Wahyuni. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Intern Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 21(1), 846–857. Retrieved from <https://doi.org/10.31316/akmenika.v21i1.5912>
- Barney, J. (1991). *Firm Resources and Sustained Competitive Advantage*. *Journal of Management* (Vol. 17).
- Becker, G. (2010). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education.
- Bustang, Akhmad, & Hakim, L. (2008). *Effectiveness of Village Fund Management: A Case Study in Bone District, South Sulawesi*.
- Jayanti, L. S. I. D., & Suardana, K. A. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 1117. Retrieved from <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p16>
- Jayanti, T. A., & Setiyani, R. (2022). Business and Accounting Education Journal. *Business and Accounting Education Journal*. Retrieved from <https://doi.org/10.15294/baej.v3i2.62304>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. Retrieved from [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jumame, S. T., Jitmau, F., Siwolo, Y. A., Saint, P., & Sorong, P. (2020). *Kinerja Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Kampung Miskum Distrik Klaso Kabupaten Sorong The Effect Of Accountability And Transparency On The Performance Of Village Fund Management Case Study Miskum Village, Sorong District*.
- Mustofa, A., & Nur Afifah, F. A. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62. Retrieved from <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>

- Nabilah, E., & Fikriana, A. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65. Retrieved from <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.78>
- RadarTegal.com. (2024). Kejari Tegal Tetapkan Mantan Kades Lebakgowah Tersangka Korupsi Dana Desa (2). *RadarTegal.Com*.
- Rahmawati, R., Heriana, T., Diana Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023a). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. Retrieved from <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Diana Sari, M., Dewi, S., & Almas, N. (2023b). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. Retrieved from <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Safitri, T. S. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecurangan Pada*.
- Schuchter, A., & Levi, M. (2016). The Fraud Triangle revisited. *Security Journal*, 29(2), 107–121. Retrieved from <https://doi.org/10.1057/sj.2013.1>
- Setiadi, N., & Devi, S. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Berbasis Siskeudes. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(No 1 Juni 2020).
- Sudariana, & Yoedani. (2022). Analisis Statistik Regresi Linier Berganda. *Seniman Transaction*, 2(2), 1–11.
- Toni. (2024, January). Pantauan ICW Atas Kasus Korupsi Dana Desa 2020 Sampai 2023 Ada Berapa Kerugian Negara ? *KompasKotaNews.Com*.
- Utami, N. W. D., Kristiantari, D. A., & Miati, N. L. P. M. (2023). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 20–25. Retrieved From <https://doi.org/10.22225/jraw.4.1.7617.20-25>
- Waruwu, S. E. R. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lasarabaene. *Journal Economics and Strategy*, 4(1), 72–81. Retrieved from <https://doi.org/10.36490/jes.v4i1.737>
- Yaldi, E., Pasaribu, J. P. K., Suratno, E., Kadar, M., Gunardi, G., Naibaho, R., ... Aryati, V. A. (2022). Penerapan Uji Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (JUMANAGE)*, 1(2), 94–102. Retrieved from <https://doi.org/10.33998/jumanage.2022.1.2.89>
- Yuniningsih, T. (2017). *Buku Ajar Mata Kuliah Etika Administrasi Publik*.